KOMPILASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
(AUDIT KEUANGAN DAN KINERJA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN PEMERIKSAAN : 2025

No dan Tgl LHP	Temuan dan Penyebab	Kode	Rekomendasi	Kode	Tindak Lanjut	Kode	Status	Paraf	Ket
700.04/2087/B.I/ITPROV 28 July 2025 Lengkapi masa tindak lanjut sampai 06 October 2025	1. Aset Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pinrang Belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terpelihara **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan anggaran pemeliharaan yang dialokasikan semenjak aset tersebut diserahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	(03) (04)	1. Disarankan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memerintahkan secara tertulis kepada pejabat penyusun program dan anggaran agar mengusulkan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pada area Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sippa di Kabupaten Pinrang kepada Tim TAPD sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) **(Rp. 0)**	(05)	1. - Tindak Lanjut : - Surat Perintah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 800.VIII/1021/DKP Tanggal 21 Agustus 2025 tentang Pengusulan Anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Area di Pangkalan Pendaratan Ikan Suppa Kabupaten Pinrang kepada Tim TAPD Provinsi Sulsel - Surat Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan CV.Sukses Jaya Groub Nomor : 523/114/1/DKP Tanggal 8 Januari 2025 tentang Pemakaian Pabrik Es PPI Lepo Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan **(Rp. 0)**	(05)	S			

Dipindai dengan CamScanner

(3) terbaru

KOMPILASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
(AUDIT KEUANGAN DAN KINERJA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN PEMERIKSAAN : 2025

No dan Tgl LHP	Temuan dan Penyebab	Kode	Rekomendasi	Kode	Tindak Lanjut	Kode	Status	Paraf	Ket
700.04/4023/B.I/ltprov 18 December 2025 Lengkapi masa tindak lanjut sampai 18 February 2026	1. Penetapan Objek Pendapatan Asli Daerah Berpotensi tidak Mencapai Target dalam DPPA TA 2025. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan kebijakan penentuan tarif sewa kantin yang diseragamkan berdasarkan luasan pada perencanaan target PAD tidak dilakukan analisis petensi kelancaran bisnis.	(05) (02)	1. Disarankan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan memerintahkan secara tertulis Sekretaris cq.Kasubag Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penetpan target Retribusi pemanfaatan BMD pada objek Kantin untuk selanjutnya melakukan penyesuaian target PAD pada tahun anggaran berikutnya dan revisi perjanjian sewa. **(Rp. 0)**	(05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523.1165/DKP Tanggal 19 Januari 2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Terlampir Hasil Koordinas dan Dokumentasi dengan Bapenda **(Rp. 0)**	(08)	S			
	2. Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada UPT PBAPL Barru KJA (Keramba Jaring Apung) yang belum ditetapkan dalam Target Pendapatan TA 2025. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan perencanaan target PAD tidak dilakukan analisis sesuai potensi yang nyata dilapangan.	(08) (03)	1. Disarankan kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan memerintahkan secara tertulis sekretaris cq. kasubag keuangan berkoordinasi dengan badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan mengenai penetapan target retribusi pemanfaatan BMD pada objek UPT PBAPL Barru KJA (keramba jaring apung) untuk selanjutnya melakukan penyesuaian target PAD pada TA 2026. **(Rp. 0)**	(05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Nomor : 523.III/271/DKP Tanggal 12 Maret 2026 tentang penetapan target PAD untuk keramba jaring senilai 25.000.000 Tahun 2026 - Terlampir Dokumentasi dan Hasil Koordinasi **(Rp. 0)**	(08)	S			
	3. Terdapat Wajib Retribusi belum Membayar Tarif Retribusi sebesar RP900.000,00. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan kurang optimalnya penagihan retribusi daerah pada objek lahan PPI PPI Maccini Baji Kab Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan kepada wajib retribusi an.Herman dan Sahir.	(02) (06)	1. Disarankan kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan memerintahkan secara tertilis kepala UPT pelabuhan wilayah I yang menangani PPI maccini baji kab pangkep mengintensifkan penagihan retribusi kepada wajib retribusi an.an.Herman dan Sahir. sebesar RP.900.000 untuk selanjutnya segera disetorkan ke kas daerah provinsi sulawesi selatan. **(Rp. 900,000)**	(01)	1. - TL : - Slip Setoran Shahrir R / M Rinaldy Rp.450.000 Tanggal 10 November 2025 - Slip Setoran Shahrir R / M Rinaldy Rp.90.000 Tanggal 18 Desember 2025 - Slip Setoran Herman / M Rinaldy Rp.540.000 Tanggal 22 Desember 2025 -Terlampir STS nama-nama tersebut diatas (Selesai) **(Rp. 900,000)**	(01)	S			
	4. Tidak Terpasang Tugu/Papan Nama Kepemilikan lahan pemerintah provinsi sulawesi selatan pada lokasi Tambak yang disewakan. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan: Belum adanya kebijakan penganggaran untuk pengadaan papan bicara/papan nama/tugu sebagai penanda BMD Provinsi sulawasi selatan.	(03) (03)	1. Disarankan kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan: a. memerintahkan secara tertulis sekretaris cq. kasubag umum, kasubag program,memasukkan ke dalam RKBMD TA 2026 untuk pengadaan papan bicara/papan nama/tugu penanda BMD sebaigaimana dimaksud uraian diatas; **(Rp. 0)** 2. b. berkoordinasi dan menyampaikan secara tertulis kepala BKAD cq. bidang aset terkait BMD berupa tanah/lahan tambak yang tidak dilengkapi papan bicara/papan nama/tugu penanda BMD untuk selanjutnya diajukan anggaran pada TA 2026. **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Kasubag Umum dan Kasubag Program Nomor : 523.1/71/DKP Tanggal 19 Januari 2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemasangan Papan Nama Lahan Tambak **(Rp. 0)** 2. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Yth.Sekretaris Daerah Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor :032/3808/DKP Tanggal 18 November 2025 Perihal Pengamanan Aset - Lampiran KIB Tanah yang belum ada papan bicara No Kode Lokasi : -11.27.00.11.05.01.01 **(Rp. 0)**	(07) (08)	S S			

5. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.423.995.00 dari 2 (DUA) Unit kendaraan dinas. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan tidak tersedia anggaran untuk prmbayaran PKB atas kendaraan dinas tersebut.	(03) (03)	1. Disarankan kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawsei selatan memerintahkan secara tertulis sekretaris cq. kasubag umum, kasubag program,memasukkan ke dalam RKBMD TA 2026 untuk penganggaran biaya pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud uraian diatas. **(Rp. 0)**	(05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan kepada Kasubag Umum dan Program Nomor : 523.1/70/DKP Tanggal 19 Januari 2026 Perihal : tindal Lanjut hasil Pemeriksaan * Bukti Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan **(Rp. 0)**	(03)	DP			
6. Barang Milik Daerah pada pengguna barang yang tidak dimanfaatkan. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan: a. BMD dalam kondisi rusak dan tidak menarik minat untuk penyewa. 2. b. tidak tersedia anggaran pemeliharaan BMD yang rusak.	(07) (03) (03)	1. Disarankan kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan: a. memerintahkan secara tertulis sekretaris cq. kasubag umum, kasubag program,memasukkan ke dalam RKBMD TA 2026 untuk penganggaran pemeliharaan BMD yang rusak sebagaiamana daftar uraian diatas untuk dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa. **(Rp. 0)** 2. b. mengajukan secara tertulis opsi pengalihan status/mutasi BMD kepada pengelola. **(Rp. 0)** 3. c. opsi mengajukan skema pemanfaatan BMD dalam bentuk selain sewa dapat berupa pinjam pakai,kerjasama pemanfaatan,bangun guna serah,atau bangun serah guna. **(Rp. 0)**	(05) (05) (05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan kepada Kasubag Umum dan Program Nomor : 523.1/66/DKP Tanggal 19 Januari 2026 Perihal : tindal Lanjut hasil Pemeriksaan Memaksukkan Anggaran Pemeliharaan BMD ke RKBMD Tahun Anggaran 2026 **(Rp. 0)**	(08)	S B B			
7. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 6 (Enam) PNS telah diterbitkan namun belum diamprah. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan: a. SK KGB terlambata disampaikan dari kasubag kepegawaian ke subbag keuangan. 2. b. Kurangnya koordinasi antara unit kepegawaian dan keuangan dalam proses pembaruan data gaji. 3. c. Belum adanya mekanisme monitoring dan pengendalian internal terhadap tindak lanjut SK KGB yang telah diterbitkan.	(03) (04) (04) (04)	1. Disarankan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi sulawesi selatan memerintahkan secara tertulis sekretaris dinas agar: a. Memerintahkan sub bagian umum untuk segera menyerahkan SK KGB kepada sub bagian keuangan. **(Rp. 0)** 2. b. Sub bagian keuangan melakukan penyesuaian daftar gaji dan membayar rapel gaji pegawai sesuai tanggal berlaku KGB berdasarkan selisih gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. **(Rp. 0)** 3. c. menetapkan prosedur koordinasi tetap (SOP) antara sub bagian umum dan sub bagian keuangan mengenai tindak lanjut SK KGB. **(Rp. 0)**	(05) (05) (05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Nomor : 523.11/189/DKP Tanggal 29 Januari 2026 Tentang Surat perintah penyerahan SK KGB Untuk menyesaikan daftar gaji. - Terlampir daftar penyesuaian pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Kelautan dan Perikanan **(Rp. 0)** 2. - TL : - Lampian Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Bulan Desember - Lampiran Daftar Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Desember - KGB An. Triyulli Fitriana A.Pi - KGB Sardi Daud A.Pi - KGB Satriani Saleh - KGB Astuty Abuyahya S.Kel - KGB Indar Dairi A.Pi M.Si - KGB Muh Thamrin Nour A Pi M.Si **(Rp. 0)** 3. - * Penetapan prosedur koordinasi tetap (SOP) antara sub bagian umum dan sub bagian keuangan mengenai tindak lanjut SK KGB. **(Rp. 0)**	(08) (08) (03)	S S DP			

8. Dua PNS Belum diberikan kenaikan gaji berkala. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemantauan jadwal jatuh tempo KGB oleh pejabat pengelola kepegawaian.	(03) (04)	1. Disarankan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi sulawesi selatan memerintahkan secara tertulis sekretaris dinas agar : a. Meningkatkan ketepatan waktu penerbitan SK KGB dengan memperkuat koordinasi antara bagian kepegawaian dan bendahara gaji. **(Rp. 0)** 2. b. Menerbitkan SK. kenaikan gaji berkala kepada kedua PNS tersebut dengan masa kerja penggajian sesuai masa kerja penggajian sesuai masa kerja yang telah dicapai. **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Sekretatis Nomor : 523.II/190/DKP Tanggal 28 Januari 2026 Tentang Peningkatan Kepatuhan Penerbitan SK KBB - Terlampir Daftar Pembayaran Gaji PNS/CPNS Dinas Kelauatan dan Perikanan Tahun 2025 * Nomor dan Tanggal belum ada **(Rp. 0)** 2. - TL : - SK KGB Asral Abdullah S.Hut M.Hut - SK KGB Kristian Yusuf **(Rp. 0)**	(08) (07)	S S				
9. Selisi perthitungan masa kerja dalam daftar gaji dengan masa kerja yang semestinya. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan pengelola kepegawaian kurang cermat dalam melakukan perhitungan masa kerja golongan pada SK.pangkat dan KGB an.Amir S.Sos NIP 196812311989031033.	(03) (06)	1. Disarankan kepada kepala dinas untuk memerintahkan secara tertulis sekretaris dinas agar: a. Mengusulkan ke BKD prov.sulsel untuk perbaikan SK.kepangkatan PNS.an.Amir,S.Sos; **(Rp. 0)** 2. b. Berkoordinasi dengan BKAD Prov.sulsel atas kelebihan pembayaran gaji atas adanya kekeliuran perhitungan masa kerja dalam SK. kepangkatan dan SK. KGB an. Amir, S.Sos. NIP 196812311989031033, selanjutnya melakukan penagihan kepada Sdr.Amir,S. Sos NIP 196812311989031033 untuk disetor ke kas daerah dan bukti setoran disampaikan ke inspektorat prov.sulsel pada kesempatan pertama. **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : - Lampiran Hasil Koordinasi Bukti Hasil Usulan ke BKD prov.sulsel untuk perbaikan SK.kepangkatan PNS an.Amir S.Sos - Petikan SK BKN Nomor : IV.58.20.00/003/KEP/2000 Tanggal 21 maret 2000 - Lampiran SK Gub Nomor : PD.823.2.39 Tanggal 19 Desember 2027 - Lampiran Surat keterangan dari BKD bahwa masa kerja sudah sesuai **(Rp. 0)** 2. - TL :- Lampiran Hasil Koordinasi dan dokumentasi dengan BKD dan BKD **(Rp. 0)**	(07) (07)	S S				
10. Pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pada pelabuhan perikanan (PPI) Lappa kabupaten sinjai dan PPI paotere kota makassar belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah provinsi sulawesi selatan. **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan A). pihak pemerintah kota makassar tidak P3D berdasarkan berita acara nomor 523.21/116/Dispertan/X/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 2. B. Pihak pemerintah kabupaten sinjai tidak konsiten terhadap P3D berdasarkan berita acara nomor 02822/22.1354/setda/IX /2020 30 September 2020 3. kebijakan yang berlaku tidak dapat menjadi pedoman yang pasti bawahan masing masing pemerintah daerah yang terkait	(03) (02) (02) (02)	1. disaran kan kepada kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan A).Berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota makassar dan pemerintah kabupaten sinjai terkait implementasi P3D Masing masing PPI paotere makassar PPI Lappa beserta fasilitas pendukungnya **(Rp. 0)** 2. B. mengajukan telah tertulis kepada gubernur melalui sekda untuk melakukan rapat pembahasan dengan pihak pemerintah kota makassar dan pemerintah kabupaten sinjai terkait implementasi P3D masing masing PPI paotere makassar dan PPI lappa beserta vasilitas pendukungnya **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : - Telaah Staff Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Failitas pelabuhan Perikanan PPI paotere Kota Makassar dan PPI Lappa Kabupayen Sinjai _ Terlampir Laporan hasil telaah staff dan koordinasi **(Rp. 0)** 2. - TK : - Telaah Staf kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Sekretaris Daerah Hal : Pengelolaan dan Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan PPI Paotere Kota Makassar dan PPI Lappa Kabupaten Sinjai **(Rp. 0)**	(08) (07)	S S				

11. Belum terdapat perjanjian kerjasama (PKS) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten /kota terkait pengelolaan dan pemanfaatan PPI **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan PPI lappa kabupaten sinjai untuk usulan PKS sementara dalam proses di Brio hukum pemprov sulsel 2. b. PPI Beba kabupaten takalar PKS belum di tanda tangani antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. 3. PPI paotere makassar sementara dalam tahap koordinasi dan konsultasi antara pemerintah kota makassar sementara dalam tahap koordinasi dan konsultasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.	(03) (02) (02) (02)	1. Disarankan kepada kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan : berkoordinasi dengan pihak pemerintah kota makassar dan pemerintah kabupaten sinjai untuk melakukan kerjasma pemanfaatan bangunan TPI pada PPI Paotere kota makassar dan bangunan TPI pada PPI lappa lab sinjai beserta fasilitas pendukungnya **(Rp. 0)** 2. B. berkoordinasi dengan pihak pemerintah takalar untuk pemanfaatan bangunan TPI pada PPI beba beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama peanfaatan. **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : * Hasil Koordinasi **(Rp. 0)** 2. - TL : * Hasil Koordinasi **(Rp. 0)**	(03) (03)	DP DP			
12. Belum diadakan pengamanan hukum terhadap 2 lokasi tanah yang belum bersertifikat **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan : untuk di kabupaten wajo dengan luas 750.00 m2 masih tercatat dalam KIM kabupaten wajo 2. Tanah di kabupaten wajo dengan luas 50000 m2 belum diusul untuk disertifikatkan karena belum ada anggaran sampai tahun 2025	(03) (02) (03)	1. disarankan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan masalah dobel selatan : Berkoordinasi dengan pemda wajo untuk menyelesaikan masalah dobel pencatatan aset tersebut. **(Rp. 0)** 2. memerintahkan secara tertulis sekretaris dinas agar dapat merencanakan dan mengusulkan anggaran sertifikat aset tersebut pada penganggaran berikutnya **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : * Hasil Koordinasi **(Rp. 0)** 2. - TL : * Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Nomor : 523.1/69/DKP Tanggal 19 Januari 2026 Hal : Usulan anggaran **(Rp. 0)**	(03) (07)	DP S			
13. penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara belim sesuai ketentuan **(Rp. 0)** 1. Hal ini disebabkan : pengurus barang pengguna selama ini hanya sanggup melakukan pendapatan status pengguna status penghuni lokasi dan tipe bangunan saja dari rumah negara. 2. belum tersedia anggaran dalam rangka inventarasi data dan pemenuhan bukti kepemilikan tanah dan bangunan.	(03) (06) (03)	1. Disarankan kepala dinas prikanan dan kelautan provinsi sulawesi selatan memerintahkan secara tertulis sekretaris cq.kasubag umum,kasubag program : mengusulkan ke dalam RKBMD TA 2026 untuk penganggaran biaya investarisasi bukti kepemilikan tanah dan bangun rumah negara sebagian dimaksud uraian diatas. **(Rp. 0)** 2. melakukan pembaruan data status pengguna, status penghuni, alamat, lokasi dan tipe bangunan dari rumah negara dimaksud. **(Rp. 0)**	(05) (05)	1. - TL : - Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Sub Bagian Keuangan dan Umum Nomor : 523.1/68/DKP Tanggal 19 Januari 2026 Hal : Sesuai rekomendasi . **(Rp. 0)** 2. - TL : - Hasil pembaruan data status pengguna status penghuni alamat lokasi dan tipe bangunan dari rumah negara dimaksud. **(Rp. 0)**	(07) (03)	S DP			